

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu, penulis menyertakan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penggunaan penelitian-penelitian tersebut bertujuan guna sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah ini agar menambah pengetahuan dan mempertajam teori yang digunakan untuk menganalisis. Beberapa penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Luna Shamieh dan Szenes Zoltán (2015) yang berjudul *The Rise of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*.¹³ Penelitian ini focus kepada perbedaan ISIS dan Al Qaeda, proses kehadirannya di Irak dan Suriah, sumber ekonomi, kekuatan militer, serta ancaman yang ditimbulkan oleh ISIS.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* merupakan metamorfosis dari *Jamaah al-Tawhid wal Jihad* yang dibentuk oleh Zarqawi di daerah Kurdi yang menjadi sasaran pasukan AS selama invasi ke Irak tahun 2003. Kelompok ini memiliki tiga sasaran utama yakni: Syiah, komunitas internasional, dan Yordania; sehingga kegiatan teror pertama yang dilakukan oleh mereka seperti apa yang sudah menjadi target mereka.

¹³ Shamieh Luna and Szenes Zoltán, "The Rise of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)," *AARMS – Academic and Applied Research in Military and Public Management Science* 14, no. 4 (December 31, 2015): 363–378–363–378, accessed November 16, 2020, <https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/aarms/article/view/1941>.

Kemudian pada September 2004, Zarqawi mengumumkan kesetiaannya kepada *al-Qaeda* dengan berbaiat kepada Osama bin Laden; dimana kelompok itu kemudian disebut sebagai AQI. Ketika Zarqawi meninggal pada 7 Juni 2006, AQI kemudian menunjuk Abu Ayyub al-Masri sebagai pemimpin baru. Dan empat bulan kemudian "*Dawla al-Islamya fi Iraq*" didirikan. Ketika Abu Bakr al-Baghdadi memegang tampuk kekuasaan sebagai pemimpin ISIS, bukan hanya Irak yang direbut oleh ISIS, mereka memperluas wilayahnya hingga ke Suriah.

Dalam penelitian ini disebutkan pula bahwa secara organisatoris, al-Qaeda dan ISIS memiliki kesamaan. Namun sisi yang membedakan mereka yaitu dalam hal strategi yang mereka kerjakan. al-Qaeda mengawali target mereka dengan strategi eksternal yang berfokus pada hubungan eksternal, contohnya seperti yang terlihat melalui tragedy serangan 9/11 dan melakukan pemboman di London. Advokasi kelompok ini difokuskan pada pertarungan melawan orang-orang dari negara lain untuk memastikan bahwa ideologi mereka akan terpengaruh.

Sementara ISIS memiliki strategi yang berlawanan, mereka fokus pada orang-orang mereka dan semua tindakan brutal yang ditimpakan pada orang-orang mereka sendiri. Perbedaan ini didasarkan pada sasaran kelompok IS dan al-Qaeda. Islamic State menganggap bahwa rakyatnya hanya terbatas pada orang Sunni. Sementara mereka menentang orang-orang non-Sunni. Mereka membunuh Syiah dan Kristen; mereka bahkan menentang orang-orang Sunni yang tidak mendukung strategi mereka.

Mereka mencoba menguasai wilayah Irak dan Suriah. ISIS percaya bahwa kendali penuh wilayah ini akan membantu mereka beralih ke langkah kedua. Semua aktivitas mereka didasarkan pada wilayah mereka, karena mereka merasa bahwa mereka tidak dapat bergerak maju ke pertempuran baru apa pun sampai mereka berhasil dengan pertempuran saat ini.

Selain itu dalam aspek ekonomi selama berdirinya, ISIS menerima dukungan keuangan dari Teluk; Namun, saat ini mereka membiayai mereka sendiri. Mereka memiliki penjualan minyak ilegal melalui sumur minyak dan kilang yang mereka distribusi ke pasar gelap. Kemudian mereka mengontrol banyak artefak kuno yang telah mereka curi dari wilayah tersebut.

Selanjutnya mereka bisa mendapatkan uang melalui sandera, pajak yang dibayar orang sebagai jaminan (misalnya orang Kristen), dan bisnis-bisnis lainnya. Bahkan ada sumber yang mengklaim bahwa ISIS adalah organisasi teroris terkaya di dunia, dengan memiliki pendapatan bersih per-bulan sebesar 8 juta US dolar melalui bisnis di Mosul saja.

Kedua, jurnal yang bertajuk “*A Constructivist Analysis of the Formation of ISIS in Iraq and its Challenges and Opportunities for Iran*” yang di tulis oleh Sayyed Mohammad Mousavi (2020)¹⁴. Jika di penelitian terdahulu yang penulis tempatkan pada urutan pertama membahas tentang perbedaan ISIS dengan al

¹⁴ Sayyed Mohammad Mousavi, “A Constructivist Analysis of the Formation of ISIS in Iraq and Its Challenges and Opportunities for Iran,” *Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution* 2, no. 6 (December 1, 2020): 1–20, accessed November 16, 2020, https://jcrir.ut.ac.ir/article_78971.html.

Qaeda, proses kehadirannya di Irak dan Suriah, sumber ekonomi, kekuatan militer, serta ancaman yang ditimbulkan oleh ISIS.

Maka di urutan kedua ini, penulis tertarik untuk jadikan penelitian dari Sayyed Mohammad Mousavi sebagai acuan. Sebab, penelitian ini berfokus terhadap factor yang menyebabkan *Islamic State of Iraq and Syam* (ISIS/Daesh) dapat berkembang dan mendominasi sebagian besar wilayah Irak hingga masuk ke Suriah, serta dampak baik dan buruk bagi Iran.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa secara historis, pandangan yang menyatakan bahwa orang yang bukan beragama Islam harus dibunuh bermula dari kelompok Khawarij, dan pandangan ini dalam dua abad terakhir dilanjutkan oleh Wahhabi. Takfirisme yang terlahir dari Wahabi dan Salafi ini diperkuat oleh fatwa-fatwa Ibn Taymiyyah tentang membunuh orang kafir dan sejenisnya, sehingga akar pemikiran serta gagasan ISIS inilah beranjak dari pandangan Ibn Taymiyyah tersebut.

Mousavi dengan pendekatan konstruktivis dalam penelitian ini menyatakan bahwa norma yang dilembagakan memiliki peranan penting untuk menentukan identitas dan kepentingan actor. Dalam hal ini, aktivisme actor didasarkan pada aturan dan norma yang terlahir dari pengalaman sejarah dan latar belakang budaya.

Di wilayah kesukuan seperti Irak, keamanan dan kelangsungan hidup baik individu maupun suku akan diperhadapkan dengan persaingan dari suku lainnya

dalam memperebutkan sumber daya alam, dan ketergantungan suku-suku ini terdapat pada populasi, keberanian, dan kekuatan tempur.

Dengan struktur sosial dan akar budaya seperti ini, sehingga memberikan peluang kepada kelompok penjahat untuk tumbuh berkembang. Dengan budaya kekerasan inilah sehingga lahir respon penolakan terhadap identitas, keamanan, dan makna simbolis kehidupan kelompok; bahkan kekuatannya dapat meningkat ketika dirangsang melalui intervensi dari elemen eksternal.

Dari pandangan konstruktivis inilah sehingga menurut Mousavi penyebab munculnya terorisme maupun ISIS bukan hanya berkuat kepada masalah kemiskinan, masalah kesehatan mental para teroris, atau aspek tingkat pendidikan.

Dalam penelitian ini disebutkan pula bahwa tujuan pembentukan ISIS di Irak terbagi menjadi dua factor, yakni internal dan eksternal. *Factor internal:* Secara historis, Irak merupakan negara yang dibuat-buat atau dipalsukan saat dibawah Kekaisaran Ottoman. Ketika runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada Perang Dunia I, Irak melalui intervensi asing pada akhirnya dikembangkan dalam bentuk negara-bangsa. Selain itu, masyarakat Irak memiliki beberapa kesenjangan yang signifikan:

1. Kesenjangan agama antara mayoritas Syiah dan minoritas Sunni.
2. Perbedaan etnis dan bahasa antara mayoritas Arab dan minoritas non-Arab dari Kurdi, Turkmenistan, dan Orang Armenia.

3. Kesenjangan antara mayoritas Muslim dan minoritas non-Muslim Armenia dan Assyria.

Dan tantangan internal yang paling signifikan di Irak adalah heterogenitas struktur budaya di tiga spektrum yakni Sunni Arab, Syiah, Kurdi, dan campur tangan regional serta kekuatan internasional yang memicu konflik ini. Tantangan dan perbedaan politik antara kelompok politik di Irak serta kurangnya kohesi politik dan konsensus adalah faktor paling kritis yang menyebabkan ketegangan internal dan peningkatan sengketa etnis dan sektarian.

Kemudian ciri paling kritis dalam masyarakat Irak sejak pembentukannya sampai sekarang yaitu menikmati pemerintahan tanpa fondasi, krisis identitas atau kurangnya identitas nasional yang inklusif, dominasi minoritas Sunni Arab yang menguasai 80% mayoritas di bidang politik dan konteks sosial. Ciri-ciri tersebut mengakibatkan jurang masyarakat semakin lebar dan krisis integrasi ditengah masyarakat Irak. Ditambah pemerintahan yang baik tidak berkembang di negara ini karena berbagai alasan.

Setelah jatuhnya Saddam, masyarakat Irak kekurangan sebuah pemerintah pusat yang kuat, dan pasukan koalisi telah memerintah negara ini berlangsung hingga 2004. Meskipun telah dialihkan kekuasaan ke Irak sejak 2004, namun mereka telah menciptakan pemerintah yang rapuh, yang tidak memiliki dukungan publik dan tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik.

Pemerintah di Irak pasca Saddam belum mampu mewujudkan *good governance* yang berfungsi di negara tersebut. Baik pemerintahan dalam tuntutan tingkat politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan pemerintah nasional yang komprehensif.

Factor eksternal: Penelitian ini menyebutkan bahwa factor eksternal yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya ISIS disebabkan karena Irak dianggap sebagai negara yang lemah akan identitas nasionalnya bersamaan dengan masyarakat yang terfragmentasi. Sehingga actor-aktor regional seperti Iran, Turki, dan negara-negara Arab berebut mempengaruhi kelompok-kelompok di Irak demi mengejar kepentingan dan tujuan mereka.

Iran yang mendukung integritas, stabilitas, dan keamanan wilayah Irak dengan cara memperkuat kelompok Syiah di Irak. Namun, negara-negara Arab yang merasa kepentingan mereka terancam dengan strategi Iran, mencoba untuk mengubah kondisi Irak menjadi situasi yang dapat menguntungkan mereka dengan cara tidak memberikan dukungannya kepada pemerintah Irak.

Pembangunan negara bangsa di Irak dipercayai oleh negara-negara Arab sebagai ancaman bagi kepentingan mereka, karena hal itu merupakan karakteristik demokratis dan pemberdayaan Syiah yang otomatis akan berpihak kepada Iran sehingga akan mengganggu keseimbangan kekuatan regional.

Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya berusaha memberikan kekuatan dan kontribusinya kepada Arab Sunni Irak dalam mengisi struktur kekuasaan,

bahkan mereka mendukung kondisi ketidakstabilan dan ketidakamanan di Irak dengan cara memfasilitasi para pemberontak yang sebagiannya berdatangan dari negara-negara Arab dengan memberikan dukungan uang maupun senjata.

Selain itu, salah satu factor yang menguatkan ISIS sehingga mendominasi berbagai wilayah Irak adalah krisis yang terjadi di Suriah. Ditengah badai krisis yang melanda Suriah, ISIS memanfaatkan wilayah Timur Suriah sebagai basis dalam mengembangkan kemampuannya dengan merekrut anggota yang berasal dari berbagai negara, melakukan pelatihan, serta agenda-agenda lainnya.

Dan yang terakhir, jika dilihat dari kacamata internasonal, tampaknya kekuatan global tidak menginginkan perdamaian dan stabilitas keamanan tercipta di wilayah teluk. Sebab, terdapat 3 argumentasi mendasar mengenai pernyataan tersebut:

Pertama, dengan adanya distabilitas di wilayah tersebut, sehingga menjadi argumentasi hadirnya kekuatan dunia di kawasan. *Kedua*, Dengan terciptanya persaingan, tantangan, dan masalah keamanan di wilayah ini sehingga melahirkan peluang besar kepada para kartel persenjataan, karena salah satu perdagangan yang sangat menguntungkan adalah perdagangan senjata.

Ketiga, Meskipun kelompok takfiri menonjolkan karakternya untuk memerangi musuh-musuh Islam, tetapi tidak tampak ancaman serius yang ditujukan kepada rezim Zionis, sehingga dapat dikatakan bahwa situasi yang diciptakan di kawasan adalah untuk membangun rasa keamanan bagi Israel.

Dari 3 argumentasi dasar di atas, menurut Mousavi dapat dikatakan bahwa terdapat dikotomi yang kontras dalam posisi Amerika Serikat tentang ISIS. Tampaknya AS menerapkan kebijakan ganda dalam perang melawan terorisme. Satu sisi ketika kelompok ekstrimis melakukan aksinya tidak sesuai dengan rencana AS, maka AS akan bangkit menghadapinya. Namun ketika mereka menyediakan kepentingan AS, maka AS akan enggan untuk bertindak brutal terhadap mereka, seperti yang terjadi kepada ISIS di Irak.

Di akhir penelitian ini, Mousavi menyatakan bahwa penyebab yang bersifat umum munculnya ISIS adalah perubahan kondisi lingkungan yang disebabkan oleh penarikan Amerika dari Irak dan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah Irak yang mayoritas Sunni.

Selain itu, kegagalan Sunni di pemilu parlemen Irak, kekalahan Salafi dalam pemilihan dan kembalinya Assad ke tampuk kekuasaan di Suriah, tindakan tersembunyi negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar dalam mendukung kelompok Takfiri dan Salafi di kawasan itu dalam menghadapi Iran dan negara pendukungnya juga merupakan factor pendukung kelahiran ISIS.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ali Soufan (2018)¹⁵, yang berjudul “*Qassem Soleimani and Iran’s Unique Regional Strategy*”. Berbeda dengan dua penelitian

¹⁵ Ali Soufan, “Qassem Soleimani and Iran’s Unique Regional Strategy,” *CTC SENTINEL* 11, no. 10 (2018): 1–12, <https://ctc.usma.edu/qassem-soleimani-irans-unique-regional-strategy/>, diakses pada 16 November 2020.

sebelumnya, dalam penelitian ini hanya berfokus kepada karir Soleimani serta kontribusinya kepada pengaruh Iran di Kawasan.

Disebutkan dalam penelitian ini bahwa Soleimani bergabung bersama *The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)* tidak lama setelah didirikannya pada April 1979. Setelah mengikuti pelatihan dasar, dia kemudian menjadi instruktur bagi anggota baru, dan saat itulah Soleimani memulai karirnya di dunia militer.

Karirnya dimulai ketika kekacauan yang terjadi pasca Revolusi Iran, yaitu ketika unitnya dikirim ke barat laut untuk memadamkan pemberontakan separatis Kurdi yang dimana misi ini merupakan awal perkenalannya dengan Mahmoud Ahmadinejad, salah satu prajurit IRGC yang menjabat sebagai Presiden Republik Islam Iran di tahun 2005. Ketika Irak menginvasi negara tetangganya di bulan September 1980, Soleimani yang awalnya dikirim ke Kerman untuk melatih pasukan, lebih memilih untuk terjun langsung ke garis depan medan pertempuran.

Tidak hanya itu, tercatat bahwa Soleimani selalu berada di garis depan ketika terjadi perebutan Bostan di bulan Desember 1981 hingga invasi Kurdistan Irak tahun 1987, bahkan tidak luput pula dia terlibat dalam ekspedisi ke *al-Faw Peninsula*.

Ketika peperangan dengan Irak berakhir pada tahun 1988, Soleimani ditugaskan kembali ke Kerman untuk berperang melawan geng narkoba yang mengancam ketertiban di wilayah tersebut. Selama tiga tahun, pasukan yang

dibawah komando Soleimani berhasil menjalankan misi mereka dan memberikan rasa keamanan dan ketentraman di provinsi tersebut sehingga dia mendapatkan simpati dari penduduk setempat.

Beberapa bulan pasca pengangkatannya sebagai Komandan Quds Force (unit khusus dari IRGC) di bulan Maret 1998, kelompok Taliban menyerang kota *Mazar-i Sharif* di Afghanistan Utara dimana wilayah tersebut mayoritasnya adalah Muslim Syiah. Kelompok Taliban melakukan tindakan brutal dengan merusak rumah, memperkosa perempuan, dan membantai ratusan laki-laki Syiah dimana diantara para korban yang tewas terdapat delapan orang diplomat dan seorang jurnalis berkewarganegaraan Iran.

Ditengah kondisi ini, Soleimani yang turun tangan meredakan situasi ini mengawali perang *proxy*-nya (yang akan dikembangkan di tempat-tempat lainnya) dengan memberikan dukungan kepada para oposisi Aliansi Utara. Dia yang mengarahkan operasi kelompok tersebut dari pangkalan di seberang perbatasan utara Afghanistan di Tajikistan. Selain itu, Soleimani melihat peluang untuk mengalahkan Taliban dengan cara yang tidak konvensional pasca tragedy 9/11 yang menimpa Amerika Serikat.

Dia bekerjasama dengan AS, yaitu dengan berbagi informasi intelijen tentang keberadaan kelompok Taliban dan sebagai balasannya adalah AS berbagi informasi dengan Iran tentang seorang pemecah masalah al-Qaida yang bersembunyi di Iran Timur.

Tampaknya dari hubungan ini memberi peluang untuk mencairkan hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat, sebagaimana yang dikatakan oleh Soleimani bahwa dirinya “senang dengan kerjasama, dan mungkin sudah waktunya untuk memikirkan kembali hubungan Iran dengan Amerika”. Namun kerja sama tersebut tiba-tiba terhenti pada Januari 2002 setelah Presiden George W. Bush menggunakan pidato kenegaraannya dengan mencap Iran sebagai negara yang represif dan pengeksport terorisme.

Dalam penelitian ini pula disebutkan bahwa ketika Amerika menginvasi Irak pada tahun 2003, Iran dan Suriah menyadari bahwa apabila AS berhasil, maka kedua negara ini merupakan target selanjutnya. Sebagai langkah mitigasi dengan merusak kependudukan AS di Irak, Soleimani membantu intelijen Suriah untuk menyalurkan jihadis Sunni ke Irak.

Selain itu, Soleimani juga melakukan intervensi secara langsung di Irak dengan mengirimkan milisi Syiah sebagai proxy. Di bawah kepemimpinannya, Pasukan Quds membentuk sejumlah milisi yang salah satunya adalah *Asaib Ahl al-Haq* dengan tujuan untuk menyerang AS dan pasukan sekutu.

Setelah pembentukan kembali pemerintahan di Irak, pengaruh Soleimani semakin meluas di negara itu, terutama di bidang politik. *Organisasi Badr* yang merupakan salah satu proxy militan Soleimani, dibawah perdana menteri Ibrahim al-Jaafari dan Nouri al-Maliki diizinkan untuk menjadi perpanjangan tangan negara ketika kementerian dalam negeri dan transportasi dibawah kendali sayap politiknya.

Selanjutnya ketika pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun 2011, Soleimani memerintahkan beberapa milisi Iraknya ke Suriah guna memperkuat rezim Assad. Kemudian masih dengan tujuan yang sama, dia juga membentuk kelompok Syiah tambahan seperti *Divisi Fatemiyoun* yang beranggotakan penduduk Afghanistan di Iran dan *Brigade Zeynabiyoun* yang berisikan pasukan Pakistan.

Sesuai dengan bentukannya, Soleimani berupaya untuk memadukan kekuatan negara dan faksi perlawanan sehingga telah berperan penting dibawah komandonya dalam perang Suriah, termasuk merebut kembali daerah Qusayr dari pemberontak.

Ketika ISIS merebut Mosul pada Juni 2014, kemudian mereka memperluas wilayah yang dikuasainya hingga mencapai pinggiran Baghdad pada bulan Oktober 2014, Soleimani yang mengetahui ketiadaan tentara yang kredibel di Irak segera mengarahkan beberapa milisi Irak yang bertugas membela Assad agar kembali ke perbatasan untuk menyelamatkan negara Irak.

Para milisi ini meleburkan diri mereka ke dalam Pasukan Mobilisasi Populer atau *Popular Mobilization Forces* (PMF), sebuah organisasi yang menjadi payung untuk koordinasi dengan pemerintah di Baghdad. Sudah banyak medan perang yang dilewati oleh pasukan ini, salah satunya ketika terjadi perebutan wilayah Tikrit di awal 2015, dimana Soleimani sendiri digambarkan berada di garis depan. Begitupun ketika ISIS masuk ke wilayah Suriah, Soleimani mengarahkan sumber daya yang ada dan mengarahkan kelompok milisi untuk berperang melawan ISIS.

Dalam penelitian ini dijelaskan pula bahwa Soleimani memiliki kontribusi besar terhadap *Hizbullah* di Libanon, dan *Houthi* di Yaman. Peran yang di mainkan oleh Soleimani terhadap dua organisasi ini yaitu selain menjalin hubungan baik dengan mereka, juga memberikan bantuan uang, persenjataan, bahkan datangkan instruktur-instruktur yang memberikan pelatihan kepada kedua kelompok ini.

2.2. Kerangka Teori dan Konsep

Seiring dengan perkembangan zaman yang berkonsekuensi pada kemajuan teknologi dan komunikasi, pola interaksi dalam hubungan internasional semakin kompleks. Dalam tataran negara, fungsi aktor yang umumnya dapat dijalankan oleh lembaga atau badan-badan yang dibentuk khusus, mulai tergeser peranannya karena dampak arus globalisasi. Batas kedaulatan negara menjadi semakin relatif maknanya sehingga fenomena ini pada akhirnya seringkali dideskripsikan sebagai dunia tanpa batas (*borderless world*).

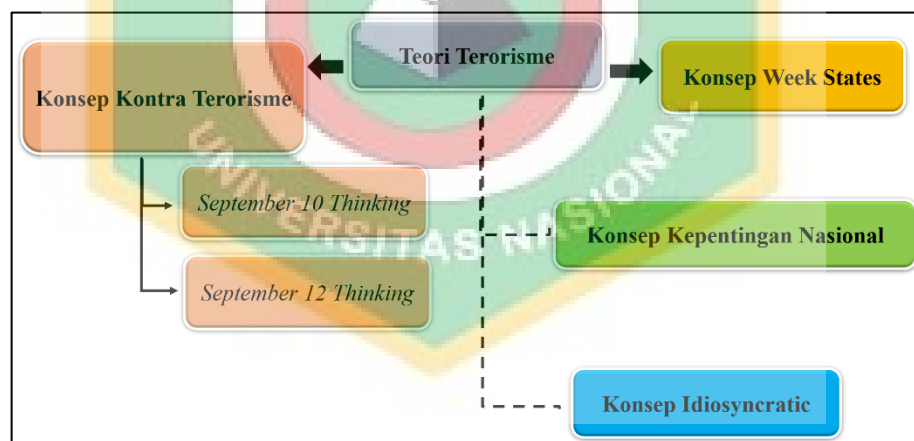
Dengan melihat fakta yang terjadi, keberadaan teori atau konsep sangat diperlukan guna membedah masalah yang akan diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini. Begitu juga dalam studi Hubungan Internasional, dalam menyusun suatu karya ilmiah dibutuhkan teori dasar agar fenomena yang diteliti relevan dengan kajian ilmu Hubungan Internasional.

Sebab, teori akan membantu dalam mendeskripsi dan mengklasifikasi fenomena serta menjelaskan pola-pola interaksi dalam hubungan internasional. Dan

apabila tanpa teori, maka fenomena dan pola-pola perilaku tersebut akan menjadi serakan fakta tak bermakna.¹⁶

Pembahasan mengenai peran Jenderal Qasem Soleimani pada tahun 2014-2019 dalam pemberantasan teroris ISIS di Irak dan Suriah, penulis akan menggunakan satu teori dan dua konsep, yakni teori terorisme yang terbagi menjadi konsep *week states* dan konsep kontra terorisme, dimana konsep kontra terorisme akan terbagi menjadi dua paradigma, yakni paradigma “*September 10 Thinking*” dan paradigma “*September 12 Thinking*”. Kemudian konsep kepentingan nasional serta konsep *idiosyncratic*.

Agar mudah dalam membaca kerangka struktur teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perhatikan gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1 Bagan Teori dan Konsep.

Penjelasan tentang teori dan konsep tersebut sebagai berikut:

¹⁶ Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik*, ed. Vinsensio Dugis, 1st ed. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016., hal. 10.

2.2.1. Teori Terorisme

Di abad ke-21 ini, dunia masih terus menyaksikan rentetan perubahan cepat dan mendasar yang pada gilirannya mempengaruhi proses transformasi pada konfigurasi politik dan ekonomi global. Bersamaan dengan dinamika perubahan global ini, telah lahir pula isu lama tapi menjadi baru dan hangat yang sangat besar pengaruhnya terhadap tatanan politik-ekonomi global saat ini. Isu ini adalah isu seputar masalah terorisme.

Term terorisme berasal dari kata teror. Secara etimologi, kata teror berasal dari bahasa Latin yakni “*terrere*” dan diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata “*mengerikan* atau *menakutkan*”. Walaupun telah ada ahli yang merumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi secara terminologis rumusan terorisme masih menjadi perdebatan hingga saat ini.¹⁷

War on Terrorism merupakan deklarasi yang pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat, namun AS dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum memberikan definisi yang jelas dan baku agar dapat diterima dan dipahami secara universal akan makna sesungguhnya tanpa dilandasi keraguan dan merasa dimarjinalkan serta didiskriminasi.¹⁸ Padahal, diperlukannya kejelasan definisi

¹⁷ Mardenis, *PEMBERANTASAN TERORISME; Politik Internasional Dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). Hal. 85.

¹⁸ Ibid. Hal. 86.

guna memitigasi tindakan yang dapat menimbulkan kerugian baik terhadap individu maupun kelompok.

Meskipun isu mengenai terorisme telah ada secara dominatif pada masa Perang Dingin dan sesudahnya, namun klimaks dari menguatnya gejala ini adalah meletusnya tragedi WTC dan Pentagon, AS, pada tanggal 11 September 2001.

Tragedi kemanusiaan yang memakan korban ribuan orang ini telah menjadi titik tolak lahirnya isu terorisme menjadi isu global masa kini. Isu terorisme telah mampu menyamai dan mungkin juga menggeser isu-isu dalam agenda internasional sebelumnya, seperti masalah hak asasi manusia, intervensi humaniter, demokratisasi, good governance, dan lingkungan hidup.¹⁹

Konsekuensi dari mencuatnya isu terorisme ke permukaan ini adalah lahirnya teroris sebagai “aktor” yang sangat diperhitungkan di pentas internasional. Hal ini sejalan dengan kecenderungan dalam hubungan internasional bahwa aktor politik global tidak lagi terbatas pada negara (*nation state actor*) sebagaimana diasumsikan oleh Perspektif Realis, melainkan juga meliputi unsur-unsur non negara (*non-state actor*), seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM, NGO), Individu, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Terorisme Internasional.

Terorisme telah hadir secara nyata dalam kehidupan antar bangsa sampai saat ini, sehingga setiap negara terutama AS dan negara-negara Eropa Barat

¹⁹ Syarifudin Tippe and Agus Subagyo, *Kapita Selekta Hubungan Internasional*, 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2016, hal. 63.

disibukkan oleh ulah para teroris yang siap mengancam kehidupan umat manusia di dunia.

Dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di setiap negara, perlu diamati setidaknya 2 hal, sebelum kita dapat melihat implementasi dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara dalam aksi terorisme yang mereka lakukan untuk stabilitas dan kedaulatan negara mereka.

Konsep yang *pertama* adalah melihat karakteristik *weak states*, apakah negara tersebut masuk ke dalam kategori *weak states* dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme? Konsep yang *kedua* adalah dengan cara melihat jenis pikiran yang dilakukan oleh negara tersebut dalam melakukan aksi kontra terorisme.

Perihal yang *pertama*, akan dibahas karakteristik *weak states*. Dengan melihat karakteristik negara-negara yang lemah, kita dapat melihat seberapa efektif strategi kontra terorisme yang negara-negara tersebut lakukan. Semakin jauh negara tersebut dalam *weak states*, semakin besar kemungkinan keefektifan strategi kontra terorisme yang dijalankan oleh negara tersebut.

Adapun karakteristik *weak states* menurut Napoleoni yakni: Yang *Pertama* negara tersebut dilanda oleh perkelahian internal antara pemerintah dengan entitas ancaman dalam negara, maupun ancaman dengan entitas lainnya. Komunitas yang seharusnya terikat dengan nama negara yang sama, berkelahi dan menciptakan instabilitas. *Kedua*, batas teritorial negara tersebut tidak dapat di kontrol oleh

pemerintah dan juga tidak bisa di definisikan dengan jelas. *Ketiga*, *ruling power* entah panglima perang atau pun pemerintah yang dictator menguasai negara tersebut dan menciptakan ketakutan sendiri diantara warga negaranya sendiri. *Keempat*, korupsi yang merajalela. *Kelima*, PDB (*Produk Domestik Bruto*) negara tersebut terus menurun dari tahun ke tahun. *Terakhir*, kekerasan dan kejahatan yang terkenal luas dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah.²⁰

Enam karakter ini adalah contoh besar dari ciri-ciri *weak states* yang bisa menandakan bahwa semakin banyak ciri-ciri negara tersebut sama dengan apa yang datang, semakin besar peluang-peluang ekstremisme berkembang di negara tersebut dan menciptakan kelompok bersenjata yang akan menjadi bibit aksi terorisme.

Perihal yang kedua dapat kita kutip dalam buku Ronald Crelinsten yang berjudul *Counterterrorism*,²¹ dijelaskan ada dua jenis paradigma untuk melakukan aksi kontra terorisme. Hal ini penting untuk dijelaskan, karena kontra terorisme di dunia ini hanya memiliki kedua tipe yang merupakan implementasi dari kedua paradigma ini.

Paradigma yang pertama adalah "*September 10 Thinking*" yang penekanannya pada pendekatan hukum terhadap kontra terorisme, menjunjung tinggi aturan hukum dan memberikan kehormatan khusus akan adanya kooperasi

²⁰ Loretta Napoleoni, *Terror Inc: Tracing the Money Behind Global Terrorism*. United Kingdom: Penguin Books, 2004, hal. 235.

²¹ Ronald Crelinsten, *Counterterrorism*, 1st ed. Oxford: Polity Press, 2009, hal. 105.

internasional dan mengerti dengan jelas akan akar penyebab terorisme. Paradigma ini merupakan pemikiran dari program kontra terorisme yang dilakukan Australia.

Paradigma yang *kedua* adalah "*September 12 thinking*," dimana aksinya adalah tindakan berbasis militer yang menggunakan kekerasan. Paradigma ini meyakini bahwa aturan bisa diganti apabila dibutuhkan.

Paradigma *September 12 thinking* intinya meyakini kekerasan yang dilakukan oleh teroris harus dibayar oleh kekerasan yang setimpal, atau bahkan kekerasan yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan apa yang dilakukan teroris tersebut. Program Amerika Serikat tentang terorisme masuk dalam golongan ini, termasuk dalam program global "*War on Terror*" yang disebarakan ke seluruh negara-negara di dunia.

Berdasarkan deskripsi singkat dari kedua jenis paradigma diatas, terlihat beberapa perbedaan antara *September 10 Thinking* dan *September 12 Thinking*, perbedaan ini pastinya memiliki dampak yang berbeda dari setiap pilihan yang diambil. Berikut akan penulis sajikan perbedaan dari kedua jenis paradigma tersebut:

Tabel 2. 1 Perbedaan September 10 dan September 12 Thinking

Paradigma	<i>September 10 Thinking</i>	<i>September 12 Thinking</i>
Pandangan terhadap kejahatan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ancaman terorisme memiliki jenis yang bergaram baik transnasional, internasional hingga domestik. ➢ Terorisme selalu berevolusi dan sudah lama ada. ➢ Terorisme merupakan sebuah tindakan kriminal. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terorisme tidak memiliki varian yang lain. ➢ Terorisme adalah ancaman baru. ➢ Terorisme adalah sebuah wajah baru dari kejahatan perang.
Penggunaan <i>weapon mass destruction nuclear defense</i>	Mungkin tidak	Mungkin ya
Dukungan dari Negara (<i>state sponsorship</i>)	Bukan fokus utama	Fokus utama
Paradigma kontra Terorisme yang dipilih	<i>Criminal Justice Model</i>	<i>War Model</i>
Pandangan atas <i>rule of law</i>, hak asasi manusia dan <i>international humanitarian law</i>	Merupakan kepentingan yang mendasar dan penting	Dapat dikompromikan atau dielakkan demi kepentingan melawan terorisme yang efektif
Respon terhadap penyiksaan dalam interogasi	Tidak dapat diterima	Diterima dengan keadaan yang tertentu dan terkontrol
Penggunaan militer dalam Strategi kontra Terorisme secara keseluruhan	Upaya terakhir	Pilihan utama
Bentuk kekuatan yang lebih diutamakan dalam <i>State Sponsor</i>	<i>Soft Power</i> : negosiasi dan diplomasi	<i>Hard Power</i> : ancaman dan sanksi berupa penyerangan secara militer

Strategi internasional yang lebih diutamakan	Pencegahan dan penahanan	Melakukan penyerangan sebelum diserang
Pandangan terhadap aliansi	Aliansi merupakan suatu hal penting	Tidak terlalu dibutuhkan

Sumber: Ronald Crelinsten, *Counterterrorism (United Kingdom: Polity Press 2009)*

Dari penjabaran teori terorisme sebagaimana yang telah diulas, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep *weak states* untuk meneliti kondisi Republik Islam Iran baik dari segi *ruling power*, korupsi, ekonomi, dan ancaman baik internal maupun eksternal.

Sementara untuk konsep kontra terorisme, karena mengingat dewasa ini kelompok terorisme telah diidentifikasi sebagai organisasi transnasional terutama ISIS, maka disini penulis akan menggunakan paradigma *September 12 Thinking* sebagai alat dalam menganalisa ancaman serta respon Republik Islam Iran terhadap terorisme.

2.2.2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan tujuan dan hasrat negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional.²²

²² Arry Bainus and Junita Budi Rachman, "Editorial: Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional," *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (May 31, 2018): 109–115, <http://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/74>., diakses pada 20 November 2020.

Menurut Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan dalam bukunya yang bertajuk *International Relations: The Key Concepts*²³ menyatakan bahwa kepentingan nasional biasanya digunakan dalam dua cara. Di satu sisi, kata kepentingan menyiratkan akan kebutuhan yang memiliki beberapa standar pembenaran, yakni mencapai status klaim yang dapat diterima atas nama negara.

Sementara di sisi lain, kepentingan nasional juga digunakan untuk menggambarkan dan mendukung kebijakan tertentu. Permasalahannya adalah bagaimana menentukan kriteria yang dapat membentuk korespondensi antara kepentingan nasional yang diekspresikan sebagai prinsip dan jenis kebijakan yang digunakannya.

Secara formal, seseorang dapat mengidentifikasi dua atribut dari kebijakan tersebut. Yang pertama adalah salah satu inklusivitas, yang menurutnya kebijakan harus menyangkut negara secara keseluruhan, atau setidaknya sebagian yang cukup substansial dari keanggotaannya untuk melampaui kepentingan khusus kelompok tertentu.

Sebaliknya, atribut kedua adalah salah satu sifat eksklusif. Kepentingan nasional tidak selalu termasuk kepentingan kelompok di luar negara, meskipun mungkin mereka melakukannya. Dengan atribut ini, kriteria apa yang

²³ Martin Griffiths and Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*. London and New York: Routledge, 2002, hal. 203, ycis.ac.in_English_InternationalRelations-key_concepts diakses pada 20 November 2020.

menghubungkan konsep tersebut dengan kebijakan tertentu? Mereka yang menjawab pertanyaan ini melakukannya dengan salah satu dari tiga cara.

Pertama, seseorang dapat dengan mudah menyamakan kepentingan nasional dengan kebijakan mereka yang secara resmi bertanggung jawab atas pelaksanaan politik luar negeri. Kepentingan nasional adalah pengambil keputusan di tingkat tertinggi pemerintahan itu. Mereka adalah penilai terbaik dari berbagai pertukaran kebijakan, oleh karena itu kepentingan nasional adalah sesuatu yang harus didefinisikan dan dipertahankan oleh mereka yang memiliki keahlian dan otoritas yang tepat untuk berkomunikasi kepada seluruh negara.

Kesulitan dengan pendekatan elitis ini adalah tidak dapat membantu dalam membedakan kebijakan luar negeri yang baik dari yang buruk. Karena menurut argumen ini, selama pemerintah mengejar apa yang dianggap sebagai tujuan masyarakat umum, maka ia tidak akan pernah bisa bertindak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pendekatan *kedua* adalah pendekatan yang sangat dekat dengan aliran pemikiran realis, yakni memahami kepentingan nasional dalam kaitannya dengan beberapa asumsi dasar tentang sifat hubungan internasional dan motivasi negara. Hal ini termasuk gagasan bahwa anarki menjadikan keamanan sebagai perhatian utama kebijakan luar negeri negara. Keamanan pada gilirannya membutuhkan perolehan dan pengelolaan kekuasaan yang rasional (yang tidak pernah dapat sepenuhnya dipisahkan dari kekuatan militer), dan hanya kebijakan yang dilakukan dalam semangat ini yang dapat melayani kepentingan nasional.

Tentu saja, pendekatan ini bergantung pada kebenaran asumsi yang mendasarinya. Dengan risiko menyederhanakan perdebatan yang sangat kompleks, setidaknya ada dua masalah dengan pendekatan ini. Pertama, ia sering menderita akibat penggunaan tautologi di mana minat sering didefinisikan dalam istilah kekuasaan, dan kekuasaan dalam istilah kepentingan. Tidak terlalu membantu untuk mengatakan bahwa negara-negara harus mencari kekuasaan karena mereka mencari kekuasaan.

Kedua, ada ketegangan penting antara kehendak bebas dan determinisme dalam pendekatan realis. Karena jika hubungan internasional memang ditentukan oleh perebutan kekuasaan, seharusnya tidak perlu mendesak para pemimpin untuk mematuhi kepentingan nasional seperti yang didefinisikan oleh kaum realis. Jika memang diperlukan, dugaan kendala anarki tidak dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi kepentingan nasional.

Sebaliknya, pendekatan *ketiga* untuk kepentingan nasional menunjukkan bahwa aturan untuk identifikasi diberikan oleh prinsip-prinsip proses politik yang memiliki nilai normatif independent, prosedur demokratis. Dengan kata lain, kepentingan nasional paling baik dapat diidentifikasi ketika ia memutuskan sendiri menjadi ekspresi preferensi bangsa yang dapat diverifikasi.

Dengan asumsi bahwa kepentingan suatu negara tidak dapat diungkapkan lebih akurat oleh beberapa pengamat eksternal daripada oleh standar bangsa itu sendiri, pendekatan ini merongrong pandangan elitis dan realis.

Dengan tidak adanya penilaian yang dikumpulkan dan diekspresikan secara demokratis tentang masalah ini, hubungan antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional tidak dapat diketahui. Ini tidak berarti bahwa negara-negara non-demokratis tidak memiliki kepentingan nasional, hanya kita tidak dapat mengetahui apa itu jika tidak ditentukan oleh prosedur demokrasi.

Tujuan dari kepentingan nasional adalah sebagai instrumen untuk menganalisa, mendeskripsikan, menjelaskan, serta mengevaluasi kebijakan luar negeri suatu negara. Sebaliknya, kebijakan merupakan alat bagi negara untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai dalam kepentingan mereka.

Di sisi lain, definisi kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein dinyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan suatu kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat melalui hubungannya dengan negara berdaulat lainnya dalam suatu lingkungan eksternal.²⁴

Selanjutnya Nuechterlein membagi kepentingan nasional dalam empat kategori dasar yakni, kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, kepentingan ideologi. Kepentingan pertahanan diartikan sebagai perlindungan terhadap negara beserta warga negaranya terhadap ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain, atau ancaman yang terinspirasi dari lingkungan eksternal terhadap sistem pemerintahan. Kepentingan ekonomi dengan

²⁴ Donald E. Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision," *British Journal of International Studies* 2, no. 3 (1976): 246–266, <https://www.jstor.org/stable/20096778?seq=1>., hlm. 248, diakses pada 20 November 2020.

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara lain.

Sementara itu, kepentingan tatanan dunia terkait dengan kerangka politik dan ekonomi internasional dimana negara merasa aman, serta dimana warga negara dan sistem perdagangannya terlindungi di luar batas negara. Sementara kategori yang terakhir adalah kepentingan ideologi yang merupakan suatu perlindungan terhadap seperangkat nilai yang dimiliki dan dipercaya baik untuk diterapkan di seluruh dunia. Dalam urutan prioritas dari setiap kategori kepentingan nasional tersebut, penulis akan menggunakan pemikiran Robert J. Art.

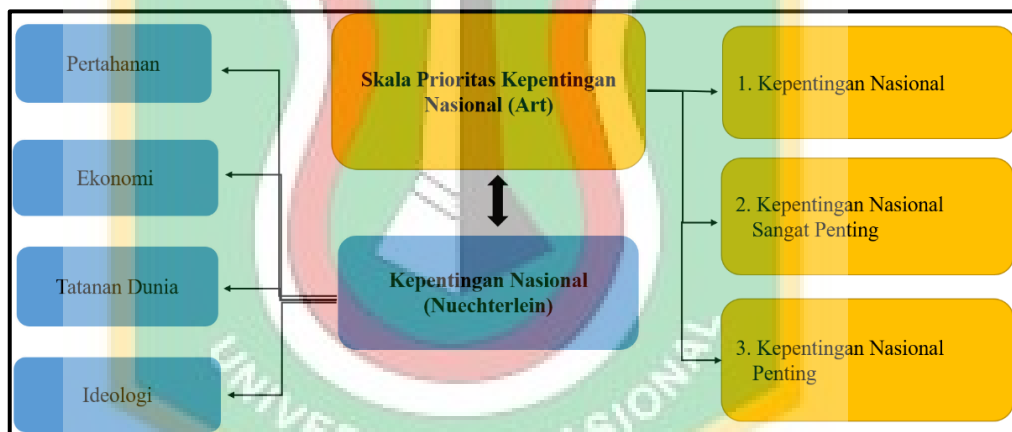
Menurut Art, prioritas nasional dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan, yakni kepentingan nasional, kepentingan nasional sangat penting, dan kepentingan nasional penting.²⁵ Kepentingan nasional adalah suatu kepentingan yang apabila tidak tercapai maka akan memberikan kerugian yang sangat besar atau bencana bagi negara. Keamanan merupakan suatu kepentingan vital bagi negara, yakni berhubungan dengan bagaimana menjaga teritori negara secara fisik dari serangan, invasi, dan destruksi, serta mempertahankan kedaulatannya.

Kepentingan sangat penting adalah suatu kepentingan yang bila diambil akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi negara. Malah, jika kepentingan tersebut tidak tercapai akan memberikan kerugian namun tidak menimbulkan bencana. Sedangkan kepentingan yang penting merupakan suatu kepentingan yang

²⁵ Robert J. Art, *A Grand Strategy for America*. New York: Cornell University Press, 2013, hlm. 45.

dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan dapat berkontribusi terhadap pembentukan lingkungan internasional agar sesuai dengan kepentingan negara tersebut. Jika tidak tercapai, kerugian yang didapatkan tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan dua tingkat sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional untuk meneliti kepentingan Republik Islam Iran di Irak dan Suriah. Dimana penulis akan menggunakan kerangka konsep yang dirumuskan oleh Nuechterlein dengan mengacu kepada skala prioritas yang dirumuskan oleh Art, sebagaimana yang dideskripsikan pada bagan dibawah ini:



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep dan Skala Prioritas.

Harapan menggunakan konsep kepentingan nasional ini adalah agar dapat membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian, serta menuntun penulis selama proses penelitian.

2.2.3. Konsep Idiosyncratic

Berbicara mengenai perumusan kebijakan, maka tentunya yang akan kita soroti dan menganalisis adalah bagaimana kebijakan itu dibuat. Dalam ilmu

Hubungan Internasional, konsep ini dikenal dengan *Decision Making* (DM). Konsep DM ini adalah konsep tentang proses pembuatan keputusan yang dipengaruhi oleh aspek intelektual (kognisi) dan pengaruh dari interaksi yang terjadi antar aktor, dominan, determinan, pasif atau yang disebut dengan psychodinamis.²⁶

Decision atau keputusan dalam terminologi David Easton merupakan output dari sistem politik, dimana nilai-nilai secara otoritatif dialokasikan dalam suatu masyarakat. Konsep DM telah lama menjadi titik fokus bagi ilmuwan politik yang tertarik untuk menganalisis perilaku pengambilan keputusan, baik seorang legislator, pejabat eksekutif, politisi, pemimpin kelompok kepentingan, dan aktor lain di arena politik.

Dengan demikian, konsep DM telah menandai pergeseran signifikan dari analisis politik tradisional, di mana para penulis terkadang cenderung untuk mereifikasi atau mempersonifikasikan negara-bangsa sebagai aktor dasar dalam sistem internasional.

Konsep DM mengarahkan perhatian bukan hanya pada negara sebagai abstraksi metafisik, atau kepada pemerintah, atau bahkan pada institusi yang diberi label luas seperti "eksekutif", tetapi sebaliknya berusaha untuk menyoroti perilaku

²⁶ Jonathan Renshon and Stanley A. Renshon, "The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Making," *Political Psychology* 29, no. 4 (August 1, 2008): 509–536, accessed November 20, 2020, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9221.2008.00647.x>, Hal. 518.

seorang pembuat keputusan yang benar-benar membentuk kebijakan pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Richard Snyder, HW Bruck, dan Burton Sapin:²⁷

“It is one of our basic methodological choices to define the state as its official decision-makers –those whose authoritative acts are, to all intents and purposes, the acts of the state. State action is the action taken by those acting in the name of the state”.

Dalam politik luar negeri, pada dasarnya seorang pemimpin (individu) dalam proses membuat suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh pengalaman, keinginan, informasi serta target yang ingin dicapai. Kuatnya peran seorang pemimpin (individu) dalam perumusan kebijakan luar negeri pada akhirnya melahirkan istilah *idiosyncratic* dalam kebijakan luar negeri.²⁸

Idiosyncratic mempelajari variable-variabel yang turut mempengaruhi seseorang dalam melakukan pembuatan kebijakan yang terkait dengan hubungan luar negeri. Hal ini dapat terlihat dalam suatu kebijakan luar negeri, dimana *idiosyncratic* adalah salah satu sumber pengambilan kebijakan luar negeri.²⁹

James Coulombis dan Wolfe mendefinisikan faktor *idiosyncratic* sebagai salah satu sumber yang berkaitan dengan persepsi, citra (*image*), dan karakteristik

²⁷James E. Dougherty and JR Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*, ed. Anita Castro, 5th ed. (United State: Priscilla McGeehon, 2001), <http://www.awl.com>. hal. 554

²⁸James N Rosenau, Kenneth W. Thompso, and Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction* (New York: The Free Press, 1976). Hal. 15.

²⁹ *Ibid.*

pribadi individu pembuat keputusan.³⁰ Sedangkan menurut H.C Warren, *idiosyncratic* merupakan pengaturan mental seseorang secara keseluruhan pada tahap manapun dalam perkembangannya.³¹ Kondisi ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia, keahlian moral, tempramen, intelektualitas, dan sikap yang telah dibangun selama proses perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan pada fase-fase yang telah dibangun tersebut.

Pendekatan *idiosyncratic* berkenaan dengan image, persepsi, dan karakteristik pribadi seorang pembuat kebijakan.³² Kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap karakteristik psikologis, terutama para pemimpin. Perjalanan hidup sejak semasa kecil hingga beranjak dewasa, pengaruh lingkungan hidup maupun keluarga secara tidak langsung telah membentuk kepribadian individu tersebut, dan pada akhirnya akan mempengaruhi si individu dalam membuat sebuah keputusan.

Begitupun dengan para pembuat kebijakan pada satu negara, akan dipengaruhi pula dengan karakteristik pribadi pemimpin politik yang berhasil membawa pengaruh besar di negara tersebut. Para tokoh politik dapat mempengaruhi pemerintah negara tersebut menuju hubungan damai dengan negara lain atau menjadi agresif.³³

³⁰ Theodore A. Coulombis and James H. Wolfe, *Introduction to International Relation: Power & Justice* Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1990, Hal 129.

³¹ Kartini Kartono, *Teori-Teori Kepribadian Dan Mental Hygiene*. Bandung: Alumni, 1974, Hal 74.

³² Margaret G. Hermann, "Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders," *International Studies Quarterly* 24, no. 1 (March 1980): 46.

³³ Ibid.

Selain itu, didalam *How The World Works: A Brief Survey of International Relations* karya Russel Bova,³⁴ dikatakan bahwa factor individu yang dapat mempengaruhi politik luar negeri dapat diklasifikasikan menjadi dua variabel utama, yakni atribut kepribadian dan sistem keyakinan.

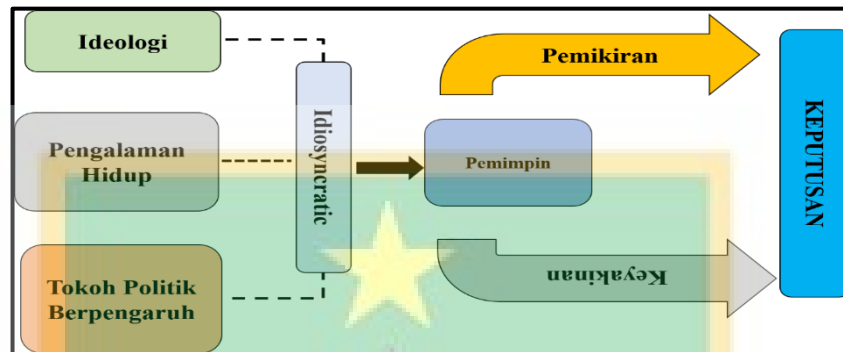
Sistem keyakinan merujuk pada seperangkat nilai-nilai serta pemahaman substantif tentang dunia yang dianut oleh seseorang. Apabila kita meyakini bahwa kualitas seorang pemimpin memiliki pengaruh terhadap politik luar negeri suatu negara, maka secara tidak langsung kita akan mengacu pada keyakinan substantif dan gagasan mereka tentang dunia.

Dalam konteks ini, perbedaan dalam sistem keyakinan dapat teraktualisasi saat perbedaan posisi dalam merespon tantangan kebijakan luar negeri tertentu. Karena sistem keyakinan yang paling rumit tingkatnya serta sangat terintegrasi adalah ideologi. Dalam hal ini, ideologi merupakan seperangkat nilai dan pemahaman yang terintegrasi tentang bagaimana dunia seharusnya dikelola, distrukturisasi, atau diorganisasi baik pada aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Misalnya ideologi nasionalis yang dianut oleh seorang pemimpin, dia akan memiliki perbedaan pemahaman tentang dunia dari seorang pemimpin yang berhaluan liberal. Perbedaan ideologis ini pada akhirnya akan berlanjut kepada pandangan negara (*state view*) tentang siapa yang dianggap musuh dan teman, sifat

³⁴ Russell Bova, *How the World Works: A Brief Survey of International Relations* (New York: Pearson Education, Inc, 2012), accessed December 9, 2020, <https://www.pearson.com/us/higher-education/product/Bova-How-the-World-Works-A-Brief-Survey-of-International-Relations-2nd-Edition/9780205082407.html>.

dari ancaman dan tantangan yang dihadapinya, serta instrumen yang dapat dipergunakan dalam menghadapi ancaman dan tantangan tersebut. Berikut adalah bagan perangruh *idiosyncratic* terhadap keputusan pemimpin:



Gambar 2. 3 Pengaruh Idiosyncratic Terhadap Keputusan Pemimpin.

Fungsi dari pendekatan *idiosyncratic* dalam penulisan ini guna memudahkan penulis dalam menganalisis dan memahami bagaimana peran dan kebijakan Qasem Soleimani yang diterapkan di Irak dan Suriah.

Adapun alasan penulis menggunakan teori terorisme dan konsep kepentingan nasional dalam penelitian ini terlebih dahulu bertujuan untuk menjelaskan kondisi Iran baik dari aspek ruling power, keamanan, teritori, dan ancaman internal maupun eksternal, serta metode kontra terorisme yang diterapkan oleh Iran, dimana penulis akan menggunakan pendekatan *September 12 Thinking*.

Setelah itu dilanjutkan dengan penelusuran kepentingan nasional Iran terhadap Irak dan Suriah dengan memakai pendekatan Nuechterlein serta mengacu kepada skala prioritas menurut Art, yakni dimulai dari kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan terakhir kepentingan tatanan dunia dan ideologi.

Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan konsep *idiosyncratic* untuk mengerucut lagi kepada peran Jenderal Qasem Soleimani selaku pemimpin Quds Force, satuan elit dalam IRGC yang merupakan utusan dari Republik Islam Iran dalam menangani teroris ISIS di Irak dan Suriah berdasarkan latar belakang ideologi dan politik yang dianut olehnya, sehingga dapat menjawab pertanyaan pada penelitian ini.

